

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Merujuk pada hasil analitik dan pembahasan sebelumnya, simpulan yang dapat ditarik ialah bahwasanya variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta Laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara kolektif memiliki daya pengaruh yang signifikan terhadap konfigurasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini berhasil mengungkap bahwasanya sebesar 75,3% variabilitas dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh ketiga konstruk tersebut, sebagaimana tercermin dalam nilai Adjusted R Square sebesar 0,753. Berdasarkan keseluruhan temuan dan pengujian empiris, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan korelasi positif yang signifikan terhadap eskalasi tingkat kemiskinan. Fenomena ini mengindikasikan bahwasanya setiap kenaikan pada proporsi penduduk yang tidak terserap dalam pasar kerja formal turut memperbesar kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Klaten. Dengan demikian, lonjakan angka pengangguran menjadi katalis struktural yang memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat miskin.
2. Sementara itu, variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Konstelasi ini menegaskan bahwasanya peningkatan IPM—yang

mencerminkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan daya beli secara nyata berkontribusi dalam mereduksi angka kemiskinan. Dengan kata lain, perbaikan kualitas hidup masyarakat menjadi instrumen transformatif dalam menekan prevalensi kemiskinan secara sistemik.

3. Pertumbuhan Ekonomi (PE) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwasanya perubahan pertumbuhan ekonomi tidak secara nyata mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum merata dan belum dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin, sehingga tidak berdampak langsung pada penurunan kemiskinan.

5.2 Saran

Berlandaskan pada simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi strategis yang layak diajukan sebagai pijakan normatif dalam merumuskan kebijakan maupun intervensi praktis selanjutnya:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, perlu adanya upaya konkret dalam menanggulangi pengangguran sebagai salah satu faktor signifikan yang memengaruhi kemiskinan. Pemerintah dapat mengembangkan program pelatihan kerja yang berbasis keterampilan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini, terutama pada sektor-sektor lokal seperti pertanian modern, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta digitalisasi ekonomi. Selain itu, pemerataan pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan harus menjadi

prioritas, terutama di daerah-daerah yang aksesnya masih terbatas, sehingga peningkatan IPM tidak hanya bersifat agregat tetapi merata di seluruh wilayah. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Daerah juga disarankan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, yaitu dengan memperbesar porsi sektor padat karya yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja miskin dan rentan.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tema serupa, disarankan untuk memperluas cakupan variabel penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Penambahan variabel seperti ketimpangan pendapatan dan partisipasi angkatan kerja dapat membantu menjelaskan dinamika kemiskinan secara lebih kompleks. Di samping itu, penggunaan pendekatan kualitatif juga dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang faktor sosial, budaya, atau psikologis yang tidak tercakup dalam pendekatan kuantitatif semata.
3. Bagi masyarakat, penting untuk menyadari bahwasanya peningkatan kualitas hidup juga membutuhkan peran aktif individu. Masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan tingkat mutu sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan secara mandiri agar lebih kompetitif di pasar kerja. Selain itu, partisipasi aktif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi yang disediakan pemerintah dapat membantu mempercepat proses keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.